

IMPLEMENTASI NILAI KEHARMONISAN BHINNEKA TUNGGAL IKA: PEMBELAJARAN BAGI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

MARYONO

Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Kementerian Kesehatan
e-mail: sebastianusmaryo@gmail.com

ABSTRAK

Pemilu dan Pilkada serentak 2024, pesta demokrasi terbesar dan pertama kali dilakukan Indonesia. Pembelajaran pemilihan sebelumnya, penggunaan politik identitas yang berlebihan, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian dapat memperkuat polarisasi dan memicu konflik di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dari praktek-praktek tersebut. Indonesia yang multikultur, keharmonisan menjadi sangat penting karena penggunaan politik identitas berpotensi terjadi polarisasi dan perpecahan di masyarakat. Nilai-nilai keharmonisan ini memainkan peran kunci dalam menjaga persatuan dan mengurangi polarisasi, sehingga mampu mencegah konflik sosial yang dapat mengancam keutuhan negara. Pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika agar masyarakat Indonesia dapat lebih memahami arti dari persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang beraneka ragam budaya, agama, dan suku bangsa. Implementasi nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan integritas Pemilu dan Pilkada. Selain itu, pengawasan terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian juga perlu ditingkatkan guna memastikan integritas dan legitimasi proses pemilihan. Implementasi nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika menjadi solusi yang relevan dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada. Dengan mempromosikan nilai-nilai keharmonisan, diharapkan masyarakat Indonesia dapat memahami arti persatuan dan kesatuan dalam konteks keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Menjaga keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kunci penting dalam menjaga stabilitas politik, demokrasi yang berkelanjutan, dan keutuhan negara. Implementasi nilai-nilai keharmonisan perlu didukung melalui literasi algoritma kebangsaan dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak terkait. Pemilu dan Pilkada yang berjalan dengan baik dan menjunjung tinggi nilai keharmonisan dapat memperkuat persatuan dan memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Implementasi nilai Bhinneka Tunggal Ika yaitu keharmonisan guna mewujudkan kesuksesan Pemilu 2024 di Indonesia menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan dan menyatukan seluruh anak bangsa.

Kata Kunci: pembelajaran, harmonis, implementasi, pemilu

ABSTRACT

Simultaneous elections and local elections in 2024, the biggest democratic party and the first time it has been held in Indonesia. Learning from previous elections, excessive use of identity politics, spreading hoaxes, and hate speech can strengthen polarization and trigger conflict in society. Therefore, effective prevention and management efforts are needed to reduce the negative impact of these practices. In a multicultural Indonesia, harmony is very important because the use of identity politics has the potential to cause polarization and division in society. These values of harmony play a key role in maintaining unity and reducing polarization, so as to prevent social conflicts that can threaten the integrity of the state. The importance of implementing the values of Sesanti Bhinneka Tunggal Ika so that the Indonesian people can better understand the meaning of unity and oneness as a nation of various cultures, religions and ethnicities. The implementation of the harmonious value of Unity in Diversity has an important role in maintaining political stability and the integrity of general elections and local elections. In addition, monitoring of the spread of hoaxes and hate speech also needs to be

improved to ensure the integrity and legitimacy of the election process. Implementation of the harmonious value of Bhinneka Tunggal Ika is a relevant solution in facing elections and local elections. By promoting the values of harmony, it is hoped that the Indonesian people can understand the meaning of unity and oneness in the context of cultural, religious and ethnic diversity. Maintaining the harmony of Bhinneka Tunggal Ika is an important key in maintaining political stability, sustainable democracy, and the integrity of the country. The implementation of harmony values needs to be supported through national algorithm literacy and collaborative efforts from various related parties. Elections and Pilkada that run well and uphold the value of harmony can strengthen unity and advance the nation in a better direction. The implementation of the value of Bhinneka Tunggal Ika, namely harmony in order to realize the success of the 2024 elections in Indonesia, is a fun democratic party that unites all the nation's children.

Keywords: learning, harmony, implementation, elections

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Pemilu merupakan sebuah proses demokrasi yang sangat penting bagi Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahkan menjadi pilar utama Indonesia sebagai negara demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Namun pada Pemilu 2024, pelaksanaannya berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Karena Pemilu 2024 bersama Pemilihan kepala daerah Gubernur dan Bupati/Walikota (Pilkada) dilakukan serentak, Pemilu digelar pada 14 Februari 2024, sementara pilkada bakal digelar 27 November 2024. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan pada tahun yang sama.

Pemilu dan Pilkada untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat memilih pemimpin yang akan duduk di badan legislatif dan eksekutif baik pada level nasional maupun daerah secara langsung dan demokratis, memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi menggunakan hak politiknya. Pemilu dan Pilkada bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta pendidikan politik dan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Selain itu, sebagai wadah menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga negara, sebagai ukuran legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin atau wakil rakyat terpilih. Sehingga suksesnya Pemilu dan Pilkada serentak tidak terlepas dari pentingnya partisipasi masyarakat, karena sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, pengalaman Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, yang sarat dengan penggunaan politik identitas dalam kampanye. Banyak hoaks dan ujaran kebencian berbau SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) yang ditunjukkan kepada salah satu pasangan calon. Sehingga terjadi pembelahan dan polarisasi di masyarakat dan bahkan elite politik, yang saat ini masih dirasakan dampaknya. Belajar dari pengalaman ini, tidak menutup kemungkinan bahwa isu-isu itu akan kembali muncul dalam Pemilu 2024 mendatang. Menurut Aryojati (2020) maraknya isu politik identitas akan mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Efek lanjutannya adalah kondisi kemasyarakatan di Indonesia menjadi rawan untuk ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu yang membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maraknya penggunaan politik identitas pada kampanye Pemilu yang mengganggu integrasi bangsa menjadi isu yang sangat serius di Indonesia. Menurut survei 2020 yang

dilakukan oleh *Indonesia Political Opinion (IPO)*, sekitar 48 persen responden menganggap bahwa isu SARA masih menjadi ancaman serius dalam politik Indonesia. Hasil survei sebelumnya pada 2019 yang dilakukan oleh *Indonesia Survey Institute (LSI)* menunjukkan bahwa polarisasi dan pembelahan masyarakat menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia, terutama di sektor politik.

Tantangan menghilangkan isu politik identitas, hoaks, dan ujaran kebencian akan menjadi salah satu pekerjaan rumah penting bagi Indonesia menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi sarana terjaminnya pergantian kepemimpinan secara konstitusional, rutin/berkala, berjalan dengan baik dan damai. Langkah-langkah perlu diambil untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari praktek-praktek tersebut. Melakukan upaya pencegahan penggunaan politik identitas yang berpotensi terjadi polarisasi dan perpecahan di masyarakat.

Negara Indonesia, berdiri dan dibangun dari keberagaman suku bangsa. Sebenarnya merupakan kondisi alamiah yang membentuk suatu sistem menjadi kokoh dan stabil. Bangsa yang multikultur dengan nilai-nilai kebangsaan yang melekat pada diri setiap warga negara atau norma kebaikan yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan itu bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dalam sikap dan perilaku setiap warga negara. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda namun tetap satu. Keharmonisan nilai kebangsaan sudah terpatrit dalam jiwa bangsa Indonesia. Dalam hal ini, pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika agar masyarakat Indonesia dapat lebih memahami arti dari persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang beraneka ragam budaya, agama, dan suku bangsa. Implementasi nilai Bhinneka Tunggal Ika yaitu keharmonisan guna mewujudkan Pemilu dan Pilkada 2024 di Indonesia menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan dan menyatukan seluruh anak bangsa.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode ini dilakukan dengan melakukan peninjauan, pengumpulan, dan analisis terhadap literatur, artikel jurnal, buku, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Langkah pertama dalam metode studi literatur adalah mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, dilakukan pembacaan dan analisis terhadap sumber-sumber tersebut. Hasil analisis digunakan untuk mendukung argumen dan temuan dalam artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik identitas menurut Agnes Haller adalah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdillah S, 2002). Menurut Lukmantoro politik identitas mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berdasarkan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Artinya politik identitas adalah praktik politik yang menekankan pada perbedaan identitas kelompok tertentu, seperti agama, etnis, atau gender, sebagai dasar untuk memobilisasi dukungan politik.

Pilkada DKI, bahkan sebelumnya yang ikut merongrong mempengaruhinya seperti halnya kejadian 212 yang dipelopori oleh FPI yang kemudian didukung oleh beberapa ormas Islam termasuk MUI, dengan dilatar belakangi oleh dugaan penistaan yang dilakukan oleh Calon Gubernur Ahok terkait pidatonya di Kepulauan seribu. Fenomena ini memperlihatkan faktor agama sangat mempengaruhi pada proses Pilkada DKI.. Pilpres tahun 2019, sejak masa kampanye, termasuk pada masa pra kampanye, menguatnya eksploitasi identitas sebagai propaganda politik, atau politisasi SARA. Meningkatnya ujaran kebencian (*hate speech*) yang

memenuhi ruang publik selama beberapa tahun sebelum dan pada saat pelaksanaan Pilpres 2019. Politik identitas dengan strategi *post truth*, dengan beredarnya narasi-narasi bahwa pemerintah memarginalkan kelompok muslim.

Politik identitas telah terbukti melahirkan polarisasi yang tajam. Exit poll Indikator Politik terhadap 2.975 responden yang baru mencoblos pada 17 April 2019 memberikan gambaran bagaimana terbelahnya masyarakat Indonesia. Masalah SARA merupakan hal yang sensitif untuk dijadikan alat kampanye. Penggunaan isu SARA dalam kampanye mempunyai lubang besar yang bisa saja ditumpangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memang menginginkan perpecahan Indonesia. Jika hal ini terus berlanjut, semangat persatuan dan kesatuan yang rendah akan meningkatkan potensi polarisasi masyarakat bahkan elite politik.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk terdiri dari bermacam suku bangsa, budaya, ras, agama dan luas wilayah yang sangat luas. Dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bangsa Indonesia mempunyai pondasi yang dikenal dengan Pilar-pilar Kebangsaan atau Empat Konsensus Dasar Berbangsa. Empat Konsensus Dasar Berbangsa merupakan hakekat nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu pilar konsesus dasar mempunyai arti berbeda-beda tetapi satu. Esensi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari nilai toleransi, nilai keharmonisan, dan nilai gotong royong. Nilai Toleransi adalah memahami dan mengimplementasikan makna perbedaan dengan mendorong terciptanya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Sikap toleransi dan kerukunan masyarakat, dapat diimplementasikan dan dikembangkan melalui beberapa metode pendekatan antara lain membangun dialog, melalui pendidikan dan seni budaya. Nilai keharmonisan untuk menunjukkan sikap keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagai akibat dari heterogenitas bangsa Indonesia, mulai dari suku, budaya, etnis, ras, agama, dan kepercayaan untuk mewujudkan negara yang adil, tertib, aman, dan damai. Sedangkan nilai gotong royong merupakan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia yang menjadi salah satu ciri khas bangsa dan yang telah berakar kuat dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penelitian Nukman, A., & Romadhon, D. (2021) menunjukkan bahwa implementasi nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dalam konteks Pemilu dan Pilkada. Nilai-nilai keharmonisan tersebut berperan dalam menjaga persatuan, mengurangi polarisasi, dan mencegah konflik yang mungkin terjadi akibat politik identitas, hoaks, dan ujaran kebencian. Studi literatur juga menunjukkan bahwa politik identitas, hoaks, dan ujaran kebencian memiliki pengaruh yang signifikan dalam Pemilu dan Pilkada. Penggunaan politik identitas yang berlebihan, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian dapat memperkuat polarisasi, memicu konflik sosial, serta mengganggu integritas dan legitimasi Pemilu dan Pilkada. (Kurniawan, T. A. 2019). Sedangkan Abidin, I. Z., & Eka Putra, E. (2021) menyoroti pentingnya mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi politik identitas, hoaks, dan ujaran kebencian dalam Pemilu dan Pilkada. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan pendidikan politik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keharmonisan dan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengintensifkan pengawasan terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Katma F. Dirun menyampaikan partisipasi masyarakat menentukan suksesnya Pemilu serentak 2024.

Semua nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari sesanti Bhinneka Tunggal Ika perlu diimplementasikan Sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya dalam menciptakan suatu kehidupan yang harmonis. Widyawati, R., & Wahyuni, S. (2020) menyampaikan tentang pentingnya nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat memperkuat

kesatuan dan menghargai keragaman di dalam masyarakat. Implementasi nilai keharmonisan dapat dilakukan dengan dialog untuk melahirkan sikap saling mengenali, memahami, dan menghargai. Saling menghormati dan menyayangi, sopan, menggunakan kata-kata yang baik. Juga tertib, menghargai hak orang lain dan hak publik, Lalu menyediakan layanan hukum, resolusi konflik dan menegakkan hukum. Implementasi dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, konteks dan kepentingannya. Dalam konteks Pemilu, implementasi nilai keharmonisan sangat penting untuk mendukung suksesnya Pemilu tahun 2024. Implementasi nilai keharmonisan dapat dilakukan dengan saling menghargai dan menghormati meskipun berbeda pilihan namun tetap bersatu dan hidup rukun dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 yang berpotensi memunculkan politik identitas, hoaks, dan ujaran kebencian, implementasi nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika menjadi solusi yang relevan. Dengan mempromosikan nilai-nilai keharmonisan tersebut, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih memahami pentingnya persatuan dan kesatuan dalam konteks keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Literasi algoritma kebangsaan memainkan peran penting dalam mendorong keharmonisan dalam Pemilu dan Pilkada 2024.

KESIMPULAN

Pemilu dan Pilkada 2024 serentak adalah pemilihan terbesar dan pertama kali di Indonesia. Belajar dari pemilihan sebelumnya, penggunaan politik identitas yang berlebihan, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian dapat memperkuat polarisasi, memicu konflik sosial, serta mengganggu integritas dan legitimasi Pemilu dan Pilkada. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan politik identitas, hoaks, dan ujaran kebencian perlu dilakukan dalam konteks Pemilu dan Pilkada.

Meningkatkan pendidikan politik, kesadaran masyarakat tentang keharmonisan dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pengawasan terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat menjadi langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Pentingnya nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga persatuan dan mengurangi polarisasi dalam konteks Pemilu dan Pilkada. Implementasi nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika sebagai solusi yang relevan dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024.

Implementasi nilai-nilai keharmonisan tersebut dapat mencegah terjadinya konflik yang mungkin timbul akibat politik identitas, hoaks, dan ujaran kebencian. Implementasi nilai keharmonisan untuk menciptakan integrasi dan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan pesta demokrasi yang damai, menyenangkan serta menyatukan seluruh anak bangsa.

Implementasi nilai-nilai keharmonisan tersebut perlu didukung melalui lebih banyak kegiatan moderasi beragama yang bertujuan untuk menciptakan integrasi dan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan politik yang baik dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak terkait. seperti:

1. Gerakan menerapkan literasi digital dalam algoritma kebangsaan. Perbanyak konten Pemilu dengan nilai-nilai kebangsaan: demokrasi dan persatuan bangsa pada media sosial dengan media flier dan video yang menarik.
2. Para pemangku kebijakan dituntut bisa mencarikan solusi atau jalan keluar untuk memitigasi risiko yang terjadi terutama apa yang berlangsung di media sosial, serta mengajak semua tokoh masyarakat, baik tokoh politik atau tokoh agama, agar mereka semua harus bersama-sama memberikan contoh yang baik, menyadarkan, membangun kembali persatuan berdasarkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan demikian, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di Indonesia dapat menjadi pesta demokrasi yang berjalan dengan baik, memperkuat persatuan, dan memajukan bangsa ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. Z., & Eka Putra, E. (2021). Bhinneka Tunggal Ika: The Implementation of Cultural Value in the Implementation of Regional Elections in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(3), 372-382.
- Aryojati Ardipandanto, (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: *Perspektif Populisme The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective. Politica* Vol. 11 No. 1.
- Hasibuan, H. (2020). Bhinneka Tunggal Ika and the Dynamics of Indonesian Democracy. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 101, 73-80.
- Juhana Nasrudin, 2018. Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). Hanifiya: *Jurnal Studi Agama-Agama Volume 1 Nomor 1*.
- Kurniawan, T. A. (2019). Bhinneka Tunggal Ika: Unity in Diversity as a Cultural Basis for Democracy in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(3), 1-8.
- Modul Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan: Materi Dasar Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika. Lemhannas RI 2023.
- Mujani, S. (2021). Politik Identitas dalam Pemilu: Antara Realitas dan Mitos. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), 187-199.
- Ni Ketut Arnit. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4 (2)
- Nukman, A., & Romadhon, D. (2021). The Implementation of Bhinneka Tunggal Ika in Pancasila-Based Political Education to Reduce Radicalism in Political Communication. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(1), 245-256.
- Prasetyo, B. (2019). Politik Identitas dalam Pemilu: Potret Nasionalisme yang Lemah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3), 237-248.
- Widyawati, R., & Wahyuni, S. (2020). Bhinneka Tunggal Ika sebagai Representasi Kesatuan dalam Keragaman: Analisis Nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 84-92.